



Isu pergantian Menteri Keuangan kembali menghangat setelah Presiden Prabowo Subianto memanggil ekonom Muhammad Chatib Basri dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin ke Istana Kepresidenan, Selasa (9/6). Pertemuan yang berlangsung terpisah itu memicu spekulasi mengenai kemungkinan perombakan di pos pengelola fiskal negara, termasuk kabar bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan digeser ke Bank Indonesia (BI). Rumor tersebut menguat di tengah tekanan terhadap perekonomian. BI pada hari yang sama mendadak menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,50 persen. Sebagai langkah darurat di luar jadwal rapat rutin. Kebijakan itu ditempuh setelah rupiah sempat menyentuh rekor terendah baru sebelum ditutup menguat di kisaran Rp18.050–Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Meski namanya ramai disebut dalam bursa calon Menteri Keuangan, baik Chatib maupun Budi berusaha meredam spekulasi. Budi, yang tiba di Istana pada sore hari, tidak memberi penjelasan mengenai agenda pertemuannya dan menegaskan dirinya masih menjabat sebagai Menkes. Adapun Chatib menegaskan bahwa pembicaraan dengan Presiden tidak terkait pergantian Bendahara Negara. Mantan Menkeu itu mengatakan dirinya hadir bersama jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk membahas perkembangan ekonomi. Dia melontarkan pandangan jika tugas Menkeu sebenarnya gampang untuk menguatkan rupiah dan menjinakkan defisit melalui tiga opsi mutlak. Yaitu menaikkan penerimaan negara, memotong anggaran belanja secara selektif, atau menarik pinjaman. Kendati semua pihak mengklaim pertemuan tersebut sebatas konsultasi, pasar membaca dinamika ini sebagai sinyal kuat 'tes ombak' pencarian bendahara negara yang baru. **BACA HAL 11...**

Muhammad Chatib Basri

- Usia**
60 tahun
- Pendidikan**
FE UI, PhD Australian National University
- Jabatan Saat Ini**
Ekonom senior, anggota Dewan Ekonomi Nasional
- Pengalaman Fiskal**
Menkeu 2013–2014, Kepala BKPM
- Pengalaman Pasar Keuangan**
Ekonom makro dan investasi
- Kekuatan Utama**
Kredibilitas tinggi di mata investor
- Tantangan**
Perlu adaptasi kembali ke pemerintahan

Purbaya Yudhi Sadewa

- Usia**
61 tahun
- Pendidikan**
Teknik ITB, MSc & PhD Ekonomi Purdue University
- Jabatan Saat Ini**
Menteri Keuangan
- Pengalaman Fiskal**
Kepala LPS (2020–2025), Menkeu sejak 2025
- Pengalaman Pasar Keuangan**
Danareksa, LPS, Kemenkeu
- Kekuatan Utama**
Memahami birokrasi fiskal saat ini
- Tantangan**
Dikritik terkait tekanan APBN dan rupiah

Budi Gunadi Sadikin

- Usia**
62 tahun
- Pendidikan**
Teknik Fisika ITB
- Jabatan Saat Ini**
Menteri Kesehatan
- Pengalaman Fiskal**
Tidak pernah menjabat Menkeu
- Pengalaman Pasar Keuangan**
Mantan Dirut Bank Mandiri, eks Wamen BUMN
- Kekuatan Utama**
Pengalaman transformasi organisasi besar
- Tantangan**
Minim pengalaman langsung mengelola APBN



USAI CHATIB-BUDI MENGHADAP:

TANDA TANYA KURSI BENDAHARA NEGARA

BI RATE MENDADAK NAIK, SINYAL EKONOMI DARURAT?

Keputusan mendadak Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50 persen memicu pertanyaan baru di pasar: apakah kondisi ekonomi Indonesia sedang memasuki fase darurat? Pasalnya, kenaikan suku bunga kali ini tidak diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan yang lazim digelar setiap pertengahan bulan, melainkan melalui RDG mingguan darurat pada Selasa (9/6).

Langkah yang jarang ditempuh itu dilakukan ketika nilai tukar rupiah terus tertekan hingga menembus kisaran Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.

Selain menaikkan BI Rate menjadi 5,50 persen, bank sentral juga mengerek suku bunga Deposit Facility menjadi 4,50 persen dan Lending Facility menjadi 6,25 persen.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan keputusan tersebut merupakan langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah yang tertekan oleh gejolak global dan keluarnya dana asing dari pasar domestik.

"Kebijakan ini juga ditujukan untuk meningkatkan imbal hasil bagi daya tarik masuknya aliran masuk investasi portofolio asing ke Indonesia," kata Denny dalam keterangan tertulis, Selasa (9/6).

Bank sentral mengakui pelemahan



rupiah sejak RDG bulanan pada 19-20 Mei lalu berlangsung lebih dalam dibandingkan perkiraan sebelumnya. Selain dipicu konflik geopolitik di Timur Tengah dan tingginya permintaan valuta asing di dalam negeri, tekanan juga datang dari arus keluar investasi portofolio asing.

"Di samping disebabkan oleh gejolak global yang terus berlanjut dan tingginya permintaan valuta asing dalam negeri, pelemahan juga didorong oleh aliran keluar investasi portofolio asing dari Indonesia," ujar Denny.

Karena itu, BI tidak hanya

PERUBAHAN BI RATE BERDASARKAN HASIL RDG

Jan 2025
BI Rate: 6,00%

Jul 2025
BI Rate: 5,25%

Sep–Des 2025
BI Rate: 4,75%

20 Mei 2026
BI Rate: 5,25%

9 Juni 2026
BI Rate: 5,50%

menaikkan suku bunga acuan. Bank sentral juga meningkatkan imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) pada tenor enam, sembilan, dan 12 bulan, memangkas biaya swap lindung nilai bagi investor asing sebesar 10 persen, membuka kembali fasilitas repo untuk perbankan, hingga memperbanyak frekuensi lelang SRBI menjadi dua kali sepekan.

Rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan bahwa tekanan terhadap rupiah dinilai cukup serius sehingga membutuhkan respons yang lebih agresif dibandingkan instrumen intervensi pasar yang selama ini dilakukan.

Di tengah meningkatnya kekhawatiran pasar, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menegaskan tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. BI memperkirakan nilai tukar rupiah dapat kembali menguat ke kisaran Rp16.800-Rp17.500 per dolar AS pada 2027.

"Mengetahui nilai tukar, kami memandang 2027 nilai tukar akan menguat. Rupiah kisarannya sama dengan pemerintah Rp16.800 sampai Rp17.500," kata Perry dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI.

Perry menyebut perbaikan prospek ekonomi global, fundamental ekonomi Indonesia yang dinilai kuat, peningkatan ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia, komitmen BI menjaga stabilitas rupiah, serta koordinasi fiskal dan moneter menjadi lima faktor yang diyakini akan menopang penguatan kurs pada tahun depan. (gus,rla,ktn/dya)

Bersiap Hadapi Efek Berantai: KPR hingga Pinjol

KEPUTUSAN mendadak Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50 persen diperkirakan tidak hanya berdampak pada pasar keuangan dan nilai tukar rupiah, tetapi juga akan dirasakan langsung oleh masyarakat melalui kenaikan bunga kredit, mulai dari kredit pemilikan rumah (KPR) hingga pinjaman online (pinjol).

Ekonom Senior INDEF, Tauhid Ahmad, menilai kenaikan BI Rate terutama ditujukan untuk menarik kembali minat investor asing ke pasar surat utang domestik, baik melalui Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) maupun Surat Berharga Negara (SBN).

"Itu bisa mendorong lagi investor masuk, terutama untuk membeli SRBI ataupun SBN. Karena kalau BI rate naik biasanya yield daripada SRBI ataupun SBN naik. Sehingga permintaan rupiah akan

menguat, ya rupiah bisa lebih stabil lagi," kata Tauhid, Selasa (9/6).

Selain menjaga stabilitas nilai tukar, kenaikan suku bunga juga diarahkan untuk meredakan tekanan inflasi. Pada Mei 2026, inflasi tercatat mencapai 3 persen dan mulai mendekati batas atas target bank sentral.

"Kedua memang untuk peredam inflasi. Karena kalau kita lihat kemarin di Mei itu 3%, mulai agak panas levelnya. Sehingga kalau katakanlah suku bunga naik, biasanya bunga kredit naiknya orang konsumsinya turun," ujarnya.

Namun kebijakan tersebut membawa konsekuensi bagi debitur. Tauhid memperkirakan perbankan dan lembaga pembiayaan akan relatif cepat menyesuaikan suku bunga pinjaman setelah BI menaikkan suku bunga acuan.

"Biasanya kenaikan BI rate lebih cepat direspons oleh kenaikan suku

bunga pinjaman untuk kredit konsumsi dan kredit investasi. Bedanya kalau BI menurunkan suku bunga, perbankan biasanya menurunkan suku bunga lebih lambat. Tapi kalau naik biasanya lebih cepat. Biasanya dalam sebulan akan naik," katanya.

Menurut dia, kenaikan bunga kredit akan berdampak langsung pada cicilan KPR, kredit konsumsi, hingga pinjaman online.

"Termasuk tadi KPR biasanya mengikuti. Termasuk pinjaman online juga bunganya pasti oleh pelaku usaha akan ikut naik. Konsekuensinya seperti itu," tegas Tauhid.

Pandangan serupa disampaikan Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal. Ia menilai keputusan BI menaikkan suku bunga secara mendadak menunjukkan tekanan terhadap rupiah sudah jauh lebih besar dibandingkan perkiraan sebelumnya. (wid,ist/dya)

DPR SAHKAN UU POLRI USIA PENSIUN HINGGA 60 TAHUN, KRITIK AROMA POLITIK MENYERUAK

Pengesahan Revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) oleh DPR pada Selasa (9/6/2026) langsung memantik perdebatan politik. Salah satu perubahan paling krusial adalah penyesuaian batas usia pensiun anggota Polri, termasuk skema khusus bagi perwira tinggi bintang empat yang membuka peluang perpanjangan masa jabatan. Tudingan kebijakan tersebut “beraroma politik” menjelang Pemilu 2029 menyeruak.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, seluruh fraksi menyatakan persetujuan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tersebut untuk disahkan menjadi undang-undang. Salah satu substansi yang disepakati adalah perubahan batas usia pensiun anggota kepolisian.

Aturan baru menetapkan, tamtama dan bintang memiliki batas usia pensiun paling tinggi 59 tahun. Sementara itu, perwira pertama, perwira menengah, dan perwira tinggi dibatasi hingga 60 tahun. Namun, untuk perwira tinggi bintang empat, jabatan tertinggi di Polri, ketentuan dibuat lebih fleksibel. Pensiun “paling tinggi 60 tahun dan dapat diperpanjang selama satu tahun atau sesuai kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden”.

Dasco menjelaskan bahwa perubahan ini juga dilandasi prinsip kesetaraan antar aparat penegak hukum. Ia menyebut, “Kalau melihat kesetaraan sesama aparat penegak hukum maupun dengan TNI, kita lihat Kejaksaan pensiun umur 61 tahun, fungsional 62 tahun kalau saya tidak salah ingat.”

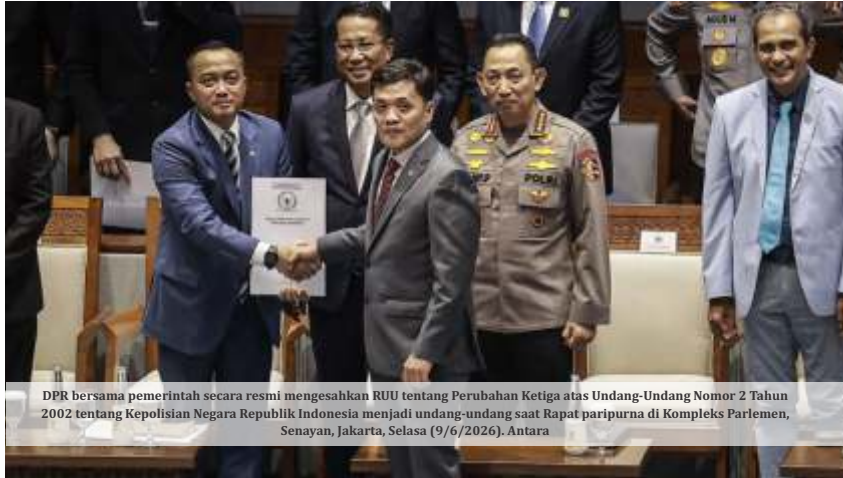
Menurutnya, penyesuaian usia pensiun juga mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan kesetaraan antar lembaga.

Ketentuan ini ditegaskan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam penjelasannya di DPR. Ia menyampaikan bahwa, “Beberapa hal yang menjadi penguatan dalam RUU Polri [salah satunya] batas usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Ia juga merinci perubahan teknis dalam pasal tersebut. “Pasal 30 ayat 5 huruf c bunyinya menjadi ‘Khusus untuk perwira tinggi bintang 4, usia pensiun paling tinggi 60 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden,’” kata Wamenkum Eddy Hiariej dalam kesempatan yang sama.

Ia menambahkan, “Jadi tambahannya adalah atau sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan presiden.”

Dalam regulasi sebelumnya, seluruh anggota Polri memiliki batas pensiun maksimal 58 tahun. Hanya



DPR bersama pemerintah secara resmi mengesahkan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang saat Rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Antara

anggota tertentu yang memiliki keahlian khusus dapat diperpanjang hingga 60 tahun. Dengan aturan baru ini, skema pensiun menjadi lebih panjang dan berjenjang sesuai kepangkatan.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menilai perubahan tersebut sebagai bentuk keadilan. Ia menyebut, “Ini sebuah keadilan. Jadi kalau soal batas usia pensiun itu, PNS sekarang pensiunnya 60 tahun, ada yang 58 tahun, ada yang 60 tahun. Yang (jabatan) fungsional bagi PNS ada 65 tahun...”

Ia juga menambahkan, “UU TNI juga sudah diubah, kemudian juga beberapa seperti UU Kejaksaan juga berubah (menjadi) 60 tahun ya kan,” serta menegaskan bahwa kebijakan ini mempertimbangkan usia harapan hidup dan produktivitas aparat.

Namun ia juga membantah bahwa revisi ini berkaitan dengan jabatan Kapolri. “Sama sekali tidak ada kaitan dengan apakah Kapolri diperpanjang atau tidak. Tetapi siapa tahu, presiden, siapapun presidennya, kalau menganggap orang yang bersangkutan masih diperlukan oleh negara...”

Ia melanjutkan, “Dan itu kan perpanjangannya tidak serta-merta harus langsung sekaligus tiga tahun, tapi setiap tahun. Setiap tahun diperpanjang.”

Dalam UU baru menyebutkan bahwa usia pensiun 60 tahun hanya berlaku bagi anggota Polri yang berusia 56 tahun ke bawah saat UU disahkan. Sementara anggota yang sudah berusia 57-58 tahun hanya mendapat tambahan satu tahun masa kerja

menjadi 59 tahun.

Dengan skema ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang kini berusia 57 tahun diperkirakan akan memasuki masa pensiun sekitar Mei 2028, atau pada usia 59 tahun.

KontraS: Kapolri Bisa Sampai Pemilu 2029

Di luar penjelasan pemerintah, kritik keras muncul dari kalangan sipil. Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, menilai kebijakan ini tidak lepas dari konteks politik jangka panjang.

Ia menyebut, “Kalau misalnya UU ini disahkan, dan masa jabatan Kapolri Listyo diperpanjang, publik pasti bertanya-tanya ada kepentingan apa? Sampai kemudian mempertahankan Kapolri sampai pemilu 2029.”

Ia juga menambahkan, “Publik belum lupa bagaimana keterlibatan kepolisian dalam dua pemilu sebelumnya yakni 2019 dan 2024, yang mana Polri menjadi operator politik tertentu,” serta menegaskan, “Sulit untuk berpikir baik dalam hal perpanjangan usia pensiun itu tidak punya muatan kepentingan politik tertentu.”

Menurutnya, dampak kebijakan ini bukan hanya soal jabatan, tetapi juga regenerasi internal. Ia menyebut adanya risiko “bottleneck” dalam karier kepolisian.

“Seperti bottleneck, ketika seseorang mau naik menjadi Perwira Menengah (Pamen) atau Perwira Tinggi (Pati), akan semakin menyempit,” katanya.

Ia juga memperingatkan, “Yang

8 Perubahan Utama UU Polri Baru

- **Tugas Kapolri Diperluas**
Tidak hanya membina SDM dan operasional, tetapi juga bertanggung jawab atas sarana-prasarana dan sistem kerja Polri.
- **Tugas Pokok Disesuaikan**
Menyesuaikan perkembangan teknologi, keamanan nasional, dan tantangan ketertiban modern.
- **Rekrutmen Disabilitas**
Penyandang disabilitas dapat menjadi anggota Polri sesuai syarat dan kebutuhan jabatan.
- **Hak Anggota Diperkuat**
Menjamin karier, kesejahteraan, perlindungan kerja, dan pengembangan profesional.
- **Penempatan di Luar Polri**
Anggota Polri dapat bertugas di kementerian/lembaga yang terkait fungsi kepolisian.
- **Penugasan Lintas Lembaga**
Dapat dilakukan atas permintaan instansi, kebutuhan keahlian khusus, atau penugasan Presiden.
- **Batas Usia Pensiun Baru**
Tamtama/Bintara: 59 tahun, Perwira: 60 tahun, Bintang 4 dapat diperpanjang.
- **Kompolnas & Pendidikan Diperkuat**
Pengawasan diperkuat, kurikulum menekankan HAM, profesionalisme, dan etika demokrasi.



kami khawatirkan dengan situasi atau minimnya ruang melakukan regenerasi, masa usia pensiun ini bisa menjadi ‘duri dalam daging’ atau ‘bom waktu’ untuk terjadinya jual beli jabatan.”

KontraS juga menyoroti jumlah personel Polri yang kini hampir mencapai 600.000 orang, namun tidak diikuti kejelasan distribusi jabatan struktural. Kondisi ini dinilai berpotensi memperlambat regenerasi kepemimpinan.

Dimas menambahkan bahwa siklus jabatan Kapolri idealnya sekitar dua tahun. Namun dalam beberapa tahun terakhir, masa jabatan cenderung lebih panjang, termasuk di era Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

“Adanya perpanjangan usia pensiun ini, otomatis posisi kapolri yang Bintang 4, akan lebih lama, yang itu secara paradigma mungkin baik dalam arti, beberapa program masih bisa berjalan...”

Namun ia menegaskan sisi negatifnya, “Tapi, negatifnya akan ada kemandekan dalam hal regenerasi kepemimpinan. Apalagi sejumlah nama yang hari ini menjabat sebagai Pamen, Pati, punya kedekatan dengan rezim politik yang berkuasa.” (gus,ist,bbc,blo/dya)

LUHUT: BANSOS NANTI TUNAI, RP5,4 JUTA/ORANG

Pemerintah berencana mengubah skema penyaluran bantuan sosial dengan mengurangi subsidi berbasis barang dan mengalihkannya menjadi bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang memenuhi syarat. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut rata-rata penerima manfaat bantuan sosial berpotensi memperoleh transfer tunai senilai Rp5,4 juta per orang.

Pernyataan tersebut disampaikan Luhut usai mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (9/6/2026). Menurut dia, perubahan skema tersebut menjadi bagian dari transformasi digital pemerintahan yang kini didukung teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

"Saya melihat nanti subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada yang menerima karena rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya, ada Rp 5,4 juta per orang. Ini nanti akan dikelompokkan dengan AI," kata Luhut.

Ia menjelaskan, pemerintah sedang membangun sistem digital terintegrasi yang memungkinkan langsung bantuan sosial disalurkan langsung kepada penerima yang berhak melalui mekanisme direct cash transfer. Data penerima nantinya akan diverifikasi dan dikelompokkan menggunakan AI sehingga bantuan



Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan Anggota DEN Chatib Basri di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/6).ist

menjadi lebih tepat sasaran.

Menurut Luhut, pemerintah saat ini telah memulai integrasi data kementerian dan lembaga ke dalam satu sistem nasional sejak 1 Juni 2026. Untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, berbagai basis data pemerintah mulai terhubung dan dapat saling mencocokkan informasi

secara otomatis.

Langkah berikutnya adalah penerapan Digital Single ID atau identitas digital tunggal yang ditargetkan mulai berjalan pada akhir tahun ini. Melalui sistem tersebut, status penerima bantuan dapat diverifikasi secara cepat menggunakan teknologi pengenalan wajah dan data terintegrasi.

Saat Ini Prabowo Tambah

Bansos Beras 3 Bulan bagi 33 Juta Penerima

PEMERINTAH memutuskan memperpanjang program bantuan pangan berupa beras 10 kilogram bagi sekitar 33 juta warga rentan. Kebijakan yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto itu ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah potensi kenaikan harga pangan, pelemahan nilai tukar rupiah, dan tekanan ekonomi yang masih membayangi.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas yang membahas perkembangan harga komoditas pangan nasional.

"Karena melihat perkembangan yang terakhir agar harga-harga sembako tidak boleh naik dalam situasi apa pun, perintah Bapak Presiden (Prabowo) tidak boleh membuat masyarakat jadi susah. Oleh karena itu bantuan beras atau bantuan pangan kita tambah tiga bulan," ujar Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (9/6).

Menurut dia, bantuan akan disalurkan kepada 33.244.000 penerima manfaat dalam bentuk beras sebanyak 10 kilogram per bulan. Penyaluran tahap pertama dijadwalkan mulai Juli 2026, sedangkan dua bulan berikutnya akan disesuaikan dengan perkembangan musim pakeklik.

"Juli harus Juli. Itu sebanyak tiga kali atau tiga bulan, 10 kg kali 33 juta (hasilnya) 244 ribu. Hampir 33,5 juta lebih kurang sedikit," kata Zulhas.

Dengan jumlah penerima tersebut, pemerintah memperkirakan kebutuhan beras untuk program bantuan mencapai sekitar 1 juta ton. Pasokan akan diambil dari cadangan beras pemerintah yang saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton.

"Kalau stok kita 5,2 juta ton akan berkurang 1 juta ton lebih kurang. Agar hampir 34 juta masyarakat kita yang paling rentan di bawah ini tidak terdampak oleh perubahan kurs atau perubahan apa pun," ujarnya.

Selain memperpanjang bantuan beras, pemerintah juga memutuskan

memberikan subsidi harga kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram. Pada tahap pertama, subsidi tersebut dialokasikan untuk 250 ribu ton kedelai guna membantu menahan kenaikan biaya produksi di sektor pangan.

"Itu dua keputusan penting yang kami lakukan, yaitu bantuan 10 kg selama tiga bulan untuk 33 juta rakyat kita selama tiga bulan. Yang kedua subsidi harga kedelai Rp2.000 per kilo sebanyak 250 ribu ton untuk tahap pertama," kata Zulhas.

Sebelum menetapkan kebijakan tersebut, pemerintah terlebih dahulu mengevaluasi kondisi stok dan harga pangan nasional. Berdasarkan laporan dari Perum Bulog, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan, pasokan pangan nasional dinilai masih aman.

Zulhas menyebut sejumlah komoditas bahkan masih diper-dagangkan di bawah Harga Acuan Pemerintah (HAP). Salah satunya telur ayam ras yang harganya turun di sejumlah daerah, termasuk di Blitar. (tin,ist/dya)

8 PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PRABOWO 2027

Total kebutuhan anggaran:
Rp1.720-Rp1.896 triliun

1. Kedaulatan Pangan

- 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih
- 4.582 kapal ikan modern
- 40.000 lokasi budidaya ikan darat
- Revitalisasi tambak nila 14.090 hektare
- Pengembangan kawasan pangan dan perkebunan
- Peningkatan produksi daging, susu, dan telur

2. Kemandirian Energi & Air

- Biodiesel B50 dan Bioetanol E20
- PLTS 100 GW
- Konversi 6 juta motor listrik
- Jargas 1 juta sambungan rumah
- Elektrifikasi 10.000 desa
- Program swasembada air

3. Pendidikan

- Makan Bergizi Gratis (MBG) siswa
- Revitalisasi sekolah
- 500 Sekolah Rakyat
- 500 sekolah nasional terintegrasi
- Digitalisasi pendidikan
- 20 Sekolah Garuda baru

4. Kesehatan

- MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita
- Upgrade 66 rumah sakit
- Pemeriksaan kesehatan gratis
- Penuntasan tuberkulosis (TBC)

5. Hilirisasi & Industrialisasi

- 18 proyek hilirisasi strategis
- Mobil nasional
- Motor nasional
- Industri semikonduktor
- Industri kedirgantaraan

6. Infrastruktur, Perumahan & Ketahanan Bencana

- Program 3 juta rumah
- Pengembangan jaringan kereta api nasional
- Rehabilitasi pascabencana
- Gerakan ASRI

7. Ekonomi Kerakyatan & Desa

- 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
- Percepatan pembangunan daerah 3T

8. Penurunan Kemiskinan

- Pro-Kesra Bansos Terintegrasi
- Pro-Kesra bagi 10 juta penduduk yang berusaha dan bekerja

Anggaran PKPN 2027:
Rp1.720-Rp1.896 triliun.

"Mungkin akhir tahun ini akan ada Digital Single ID yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted. Jadi akan sesuai dan itu akan menghemat angka cukup besar," ujarnya.

Luhut menilai perubahan pola subsidi dari bantuan barang menjadi bantuan tunai akan mengurangi kebocoran sekaligus memastikan anggaran negara diterima langsung oleh masyarakat yang berhak. (wis,ist/dya)

**HARTA KEKAYAAN
RAFFI AHMAD**

TOTAL ASET

Rp 1,033 Triliun

-  Tanah & Bangunan
Rp 733,15 Miliar
-  Alat Transportasi
Rp 55,14 Miliar
-  Harta Bergerak lainnya
Rp 46,75 Miliar
-  Kas dan Setara Kas
Rp 17,57 Miliar
-  Surat Berharga
Rp 307,93 Miliar
-  Harta Lainnya
Rp 5,3 Miliar
-  Utang
Rp 136,05 Miliar

RAFFI AHMAD TERSERET KORUPSI BEA CUKAI



Nama Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, mencuat dalam persidangan kasus dugaan korupsi terkait importasi barang dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Penyebutan nama Raffi terungkap dalam sejumlah percakapan WhatsApp yang dibacakan di persidangan perkara yang menyeret petinggi PT Blueray Cargo.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan bahwa nama Raffi memang muncul dalam fakta persidangan. Namun hingga kini, lembaga antirasuah belum menemukan indikasi bahwa keterlibatan Raffi berkaitan dengan tindak pidana yang sedang diusut.

"Tadi terkait fakta ada di persidangan terungkap, di

pemeriksaan juga karena itu dari pemeriksaan saksi, ada saudara RA (Raffi Ahmad) ya, ini seperti apa? Ya betul, karena memang itu sudah fakta persidangan," kata Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein kepada wartawan, Selasa (9/6).

Menurut Taufik, penyidik belum mengembangkan informasi tersebut

karena belum ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa tindakan Raffi merupakan bagian dari praktik korupsi yang sedang disidik dalam perkara Blueray Cargo.

Ia juga menegaskan bahwa dugaan penitipan barang yang dilakukan Raffi belum dapat dikategorikan sebagai penyelundupan. Pasalnya, jumlah barang yang disebut dalam

persidangan hanya dua unit.

"Kita waktu itu belum sampai kepada mengarah bahwa itu penyelundupan karena ini hanya sekitar ada dua unit mungkin yang dititipkan, laptop mungkin, karena ada perkenalan atau apa, sehingga itu kemudian di proses penyidikan yang Blueray kemarin kita tidak kembangkan terlalu jauh karena belum sampai kepada fakta-fakta yang menguatkan bahwa itu jadi bagian dari peristiwa Blueray mengurus keimigrasian di Ditjen Bea Cukai," ujar Taufik.

Meski demikian, KPK membuka kemungkinan mendalami fakta-fakta baru yang muncul selama persidangan.

"Nah, apakah nanti fakta-fakta persidangan itu akan menjadi fakta baru yang kemudian perlu didalami? Ya kami akan lakukan pemeriksaan-pemeriksaan tentunya," kata dia.

Nama Raffi pertama kali disebut dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Jumat (5/6). Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum KPK memeriksa Sri Pangestuti alias Tuti, seorang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PJK), terkait permintaan pengiriman barang elektronik dari Amerika Serikat ke Indonesia.

Jaksa mengungkap percakapan WhatsApp antara Tuti dan Yohanes, asisten pribadi pemilik PT Blueray Cargo, John Field. Dalam percakapan tertanggal 15 Oktober 2025 itu, Yohanes menyampaikan adanya permintaan pengiriman laptop dan iPhone milik Raffi Ahmad. (wid,ist/dya)

Dirjen Bea Cukai Buka Suara

DIREKTUR Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama akhirnya angkat bicara setelah namanya muncul dalam persidangan kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan impor barang yang sedang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski demikian, mantan perwira TNI yang baru dilantik memimpin Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu memilih tidak banyak berkomentar dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada proses hukum yang sedang berjalan.

"Terkait dengan permasalahan importasi di Bea Cukai, kita sama-sama ikuti perkembangan persidangan saja," kata Djaka saat konferensi pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 5 Juni 2026.

Pernyataan tersebut muncul setelah nama Djaka tercantum dalam surat dakwaan jaksa KPK terhadap tiga petinggi perusahaan jasa pengurusan impor PT Blueray Cargo.

Ketiganya adalah John Field selaku pimpinan perusahaan, Deddy Kurniawan Sukolo sebagai manajer operasional, dan Andri yang menjabat ketua tim dokumen.

Dalam dakwaan, jaksa menuduh para terdakwa memberikan suap dan gratifikasi kepada sejumlah pejabat Bea Cukai demi melancarkan pengurusan impor barang. Nilainya tidak kecil.

Jaksa menyebut uang yang diberikan mencapai sekitar Rp61,3 miliar dalam bentuk dolar Singapura. Selain uang tunai, para terdakwa juga didakwa memberikan berbagai fasilitas dan barang mewah dengan nilai sekitar Rp1,8 miliar.

Nama Djaka mulai menjadi sorotan setelah jaksa mengungkap adanya pertemuan antara sejumlah pejabat Bea Cukai dan pelaku usaha kargo pada Juli 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Dalam surat dakwaan disebutkan bahwa

pertemuan tersebut dihadiri Djaka bersama sejumlah pejabat lain, antara lain Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan Sianipar.

"Bahwa selanjutnya pada Juli 2025 bertempat di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan Nomor 1, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, dilakukan pertemuan antara pejabat-pejabat di DJBC antara lain Djaka Budi Utama, Rizal, Sisprian Subiaksono dan Orlando Hamonangan Sianipar," demikian kutipan surat dakwaan yang dibacakan jaksa.

Perkembangan terbaru di persidangan juga memunculkan kesaksian mengenai pemberian sebuah goodie bag yang disebut ditujukan kepada Djaka. Kesaksian itu disampaikan Pelaksana Pemeriksa Kantor Pusat Bea Cukai, Aditya Rachman Rony Putra, saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 3 Juni 2026. (wid,ist/dya)

Dilema Pemkot Malang: Lahan Koperasi Merah Putih Potensi Caplok RTH

MALANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menghadapi dilema dalam merealisasikan Program Koperasi Merah Putih (KMP). Lahan yang dinilai memenuhi kriteria untuk pwndirian koperasi sebagian besar berstatus Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

"Kalau Koperasi Merah Putih itu memang menggunakan aset. Pemkot Malang sudah ada dua yang sudah dibangun, di Arjowinangun dan Bandungrejosari. Tetapi kendala untuk sisanya, karena aset kami rata-rata merupakan RTH dan LSD," ujar Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang, Subkhan, ditemui di Balai Kota Malang, Selasa (9/6/2026).

Menurutnya, perubahan fungsi lahan RTH maupun LSD tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pemerintah daerah. Setiap perubahan peruntukan wajib memperoleh izin dan rekomendasi dari Kementerian ATR/BPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BKAD sendiri telah mengajukan sekitar 13 hingga 21 bidang aset untuk

dipertimbangkan sebagai lokasi pembangunan KMP. Namun hingga kini rekomendasi tersebut belum juga diterbitkan.

"Saya tidak hafal angka pastinya. Tetapi sampai sekarang belum turun rekomendasinya. Kalau sudah ada rekomendasi dari ATR/BPN baru boleh jalan. Kalau tidak, kami juga tidak berani," tegasnya.

Belum keluarnya persetujuan tersebut dinilai tidak lepas dari kondisi Kota Malang yang masih menghadapi kekurangan luasan RTH. Apabila sebagian lahan hijau dialih-fungsikan, maka berpotensi semakin mengurangi persentase ruang terbuka hijau yang dimiliki daerah.

Subkhan menjelaskan, aset-aset yang diajukan dipilih karena secara fisik dinilai memungkinkan untuk dimanfaatkan. Namun berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), lahan tersebut telah dipetakan sebagai RTH dan LSD sehingga BKAD tidak memiliki kewenangan untuk langsung merekomendasikan penggunaannya.

"Dianggap itu aset yang bisa digunakan. Tetapi di plotting RTRW-

nya memang RTH dan LSD. Kami tidak berani tiba-tiba merekomendasikan tanpa rekomendasi dari Kementerian ATR/BPN," jelasnya.

Subkhan juga mengungkapkan, permintaan penyediaan aset tersebut berasal dari Agrinas. Pengajuan tersebut telah disampaikan sejak akhir 2025 hingga awal 2026.

Namun, menurut Subkhan Pemkot Malang telah menyampaikan keberatan terhadap penggunaan lahan yang berpotensi mengurangi RTH.

"Sudah kami tolak. Tetapi cara menolaknya bukan langsung menyebut tidak bisa. Ini juga masuk Program Strategis Nasional. Dari sisi saya sebagai pengelola aset, kewenangan lebih tepat ada di Dinas



Kepala BKAD Kota Malang, Subkhan. (Santi/Lentera)

Koperasi maupun perangkat daerah terkait," katanya.

BKAD pun masih membuka kemungkinan alternatif lain apabila nantinya izin dari ATR/BPN keluar. Salah satu opsi yang dinilai lebih aman adalah memanfaatkan aset kantor kelurahan sebagai lokasi operasional Koperasi Merah Putih sehingga keberadaan ruang terbuka hijau tetap dapat dipertahankan. (Santi/Dya)

Kabupaten Malang Daftarkan 11.891 Relawan MBG ke BPJS Kesehatan



Ilustrasi: Relawan SPPG Kabupaten Malang menyiapkan porsi MBG. (foto: ist)

MALANG - Sebanyak 11.891 relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Malang bakal mendapatkan perlindungan BPJS Kesehatan.

"Yang belum terakomodasi adalah 47 relawan di setiap SPPG. Totalnya mencapai 11.891 orang. Mereka yang menjadi prioritas untuk didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan," ujar Sekretaris I Satgas MBG Kabupaten Malang, Mahila Surya Dewi, Selasa (9/6/2026).

Dikatakannya, saat ini terdapat

253 SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Malang. Masing-masing satuan pelayanan melibatkan sekitar 50 tenaga kerja, terdiri dari kepala SPPG, ahli gizi, akuntan, serta puluhan relawan yang bertugas menyiapkan hingga men-distribusikan makanan bergizi

kepada masyarakat.

Dari jumlah tersebut, tiga posisi, yakni kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan, telah berstatus aparatur sipil negara (ASN) sehingga kepesertaan jaminan kesehatannya telah ditanggung pemerintah. Sebaliknya, sebanyak 47 relawan di setiap SPPG belum memperoleh perlindungan serupa.

Menurut Mahila, rencana tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat koordinasi antara Satgas MBG Kabupaten Malang, BPJS

Kesehatan, serta para koordinator wilayah dan koordinator kecamatan SPPG.

Dalam skema yang tengah disiapkan, iuran BPJS Kesehatan bagi para relawan tidak dibebankan kepada pemerintah daerah maupun peserta. Pembayaran iuran nantinya akan menjadi tanggung jawab yayasan yang menaungi masing-masing SPPG.

"Berdasarkan paparan BPJS Kesehatan saat rakor, iuran peserta nantinya dibayarkan oleh yayasan," katanya.

Mahila menilai perlindungan kesehatan menjadi kebutuhan penting karena relawan SPPG memiliki risiko kerja yang tidak kecil. Selain bertugas menyiapkan makanan bergizi dalam jumlah besar, mereka juga terlibat dalam proses pengemasan, distribusi, hingga aktivitas operasional harian yang berpotensi menimbulkan risiko kesehatan maupun kecelakaan kerja.

"Setiap pekerjaan memiliki risiko. Karena itu, kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi bentuk perlindungan bagi para relawan,"

tegasnya.

Meski demikian, implementasi program tersebut belum dapat langsung dijalankan. Satgas MBG masih akan melakukan pendataan lanjutan dengan mengundang kepala SPPG dan pihak yayasan untuk menyusun mekanisme kepesertaan sekaligus memverifikasi jumlah relawan yang akan didaftarkan.

Pendataan ulang dinilai penting karena hingga saat ini masih terdapat 32 SPPG di Kabupaten Malang yang berstatus suspend dari pemerintah pusat, sehingga jumlah peserta yang akan memperoleh perlindungan masih berpotensi berubah.

Tak hanya mendorong kepesertaan BPJS Kesehatan, Satgas MBG juga mengupayakan seluruh relawan SPPG masuk dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan kepesertaan tersebut, sambung Mahila, relawan diharapkan memperoleh perlindungan yang lebih komprehensif, mulai dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan kehilangan pekerjaan, hingga jaminan hari tua. (Santi/Dya)

HOUTHI BLOKADE LAUT MERAH, KAPAL ISRAEL JADI TARGET MILITER

Kelompok Houthi kembali menaikkan eskalasi di kawasan Red Sea (Laut Merah) dengan mengumumkan dua langkah sekaligus. Pertama serangan rudal ke wilayah Israel dan kedua pelarangan total navigasi kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel di jalur laut strategis tersebut. Pernyataan ini menandai babak baru ketegangan yang berpotensi mengganggu kembali arus perdagangan global di salah satu jalur energi terpenting dunia.

Dalam pernyataan resmi yang dikutip sejumlah media internasional, Selasa (9/6/2026) Angkatan Bersenjata Houthi menegaskan kebijakan penutupan akses maritim secara menyeluruh bagi Israel di Laut Merah.

"Kami menetapkan larangan total dan menyeluruh terhadap navigasi maritim Israel di Laut Merah," demikian pernyataan militer Houthi.

Kelompok tersebut juga memperluas definisi target militernya dengan menyatakan bahwa setiap pergerakan yang dianggap terkait Israel akan diperlakukan sebagai sasaran sah.

"Kami menganggap semua pergerakan musuh sebagai target militer yang sah bagi angkatan bersenjata kami sejak saat pernyataan ini dikeluarkan," lanjut pernyataan itu.

Sejalan dengan klaim tersebut, Houthi juga menyebut telah melancarkan serangan rudal ke wilayah Israel, termasuk target di kawasan Tel Aviv, yang diklaim sebagai bagian dari operasi balasan terhadap agresi militer yang lebih luas di Timur Tengah.

Dalam laporan lain, Angkatan Bersenjata Yaman menyatakan serangan tersebut turut berdampak



Dua pria memeriksa roket yang jatuh setengah terkubur di dalam tanah di pinggiran Jericho pada 8 Juni usai Israel diserang Iran-Houthi. (AFP)

pada aktivitas penerbangan di Bandara Ben Gurion yang dilaporkan sempat dihentikan sementara. Setelah serangan itu, mereka secara resmi mempertegas larangan navigasi total terhadap kapal Israel di Laut Merah.

Juru Bicara militer Houthi, Brigjen Yahya Saree, menegaskan bahwa operasi tersebut merupakan respons atas rangkaian konflik regional yang melibatkan Iran, Gaza, Lebanon, dan Yaman sendiri.

"Angkatan Bersenjata Yaman telah meluncurkan serangkaian rudal yang menargetkan sasaran-sasaran sensitif

milik musuh Israel di wilayah Jaffa yang diduduki," ujar Yahya Saree.

Ia menambahkan bahwa kebijakan militer kelompoknya tidak akan berhenti pada satu tahap eskalasi saja.

"Kami mengumumkan larangan navigasi maritim secara penuh dan total bagi musuh Israel di Laut Merah. Kami menegaskan akan menghadapi eskalasi dengan eskalasi, dan operasi militer kami akan terus meningkat demi mengimbangi pertempuran," tegasnya.

Pernyataan itu juga diperkuat

dalam laporan media lain yang menyebut Houthi menegaskan kembali doktrin "balas eskalasi" sebagai respons terhadap perkembangan konflik di kawasan.. (gus,ist,rtr,jaz/dya)

HARGA PENUTUPAN MINYAK MENTAH DUNIA JENIS BRENT DAN WTI

Selasa, 9 Juni 2026

- Brent Crude: US\$ 94,38 per barel
- WTI Crude: US\$ 91,41 per barel

Senin, 8 Juni 2026

- Brent Crude: US\$ 94,25 per barel
- WTI Crude: US\$ 91,30 per barel

Jumat, 5 Juni 2026

- Brent Crude: US\$ 93,09 per barel
- WTI Crude: US\$ 90,54 per barel

Kamis, 4 Juni 2026

- Brent Crude: US\$ 95,03 per barel
- WTI Crude: US\$ 93,23 per barel

Rabu, 3 Juni 2026

- Brent Crude: US\$ 96,50 per barel
- WTI Crude: US\$ 93,20 per barel

Selasa, 2 Juni 2026

- Brent Crude: US\$ 96,00 per barel
- WTI Crude: US\$ 93,76 per barel

Senin, 1 Juni 2026

- Brent Crude: US\$ 93,08 per barel
- WTI Crude: US\$ 91,08 per barel

Trump Klaim 'Kemenangan Total' atas Iran akan Dicapai 2 Pekan Lagi

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan keyakinannya bahwa Washington akan segera mencapai apa yang ia sebut sebagai 'kemenangan total' atas Iran dalam waktu sekitar dua pekan ke depan. Pernyataan itu disampaikan dalam sebuah pertemuan daring untuk mendukung Senator Lindsey Graham di South Carolina, di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Trump menilai Iran kini menunjukkan sikap lebih terbuka untuk bernegosiasi. Ia menyebut bahwa proses diplomasi masih berlangsung dan Teheran mulai mempertimbangkan konsesi signifikan, termasuk isu sensitif terkait program nuklir.

"Kami sedang bernegosiasi, dan mereka ingin mencapai kesepakatan yang sangat baik. Mereka bersedia membuat banyak konsesi, termasuk melepaskan ambisi mereka untuk memiliki senjata nuklir," ujar Trump.

Ia bahkan memperkirakan hasil akhir dari proses tersebut akan menguntungkan Amerika Serikat. "Saya pikir kita akan memenangkan perang ini. Dalam dua minggu ke depan, ketika kita menyatakan kemenangan penuh, itu akan menjadi kemenangan total. Itu akan segera terjadi, dan harga minyak akan anjlok," kata Trump.

Pernyataan tersebut juga disertai klaim bahwa kesepakatan dengan Iran pada akhirnya hanya membutuhkan waktu sebelum tercapai. Namun, ini

bukan pertama kalinya Trump memberikan tenggat waktu spesifik dalam isu kebijakan luar negeri, termasuk konflik Iran-Israel yang sebelumnya juga disebut akan segera menghasilkan kesepakatan dalam hitungan minggu.

Dalam wawancara lain, Trump menilai Iran sebagai negara besar yang memiliki kebanggaan nasional tinggi, sehingga proses negosiasi membutuhkan waktu lebih panjang.

"Mereka adalah bangsa yang kuat dan sangat bangga. Ada hal-hal yang tidak pernah mereka duga harus mereka terima, tetapi sekarang mereka terpaksa menerimanya. Mereka tidak punya banyak pilihan lain, dan itu akan membutuhkan waktu," katanya.

Di saat yang sama, kawasan Timur Tengah kembali memanas setelah pertukaran serangan antara Iran dan Israel, yang disebut sebagai salah satu eskalasi terbesar sejak gencatan senjata sebelumnya yang dimulai 8 April. Laporan menyebutkan bahwa serangan rudal dan operasi militer terjadi di beberapa titik, termasuk wilayah Israel tengah, sementara sistem pertahanan udara diaktifkan untuk menghadang serangan masuk. Sirene juga dilaporkan terdengar di wilayah Yordania.

Iran menegaskan bahwa pihaknya akan menilai Amerika Serikat sebagai pihak yang bertanggung jawab atas eskalasi konflik, dengan alasan keterkaitan Washington dalam dukungan terhadap Israel. (wid,ist/dya)

Pubertas Dini Bisa Dipicu Sejak di Kandungan, Pakar Soroti Paparan BPA

Pencegahan pubertas dini pada anak sebaiknya dimulai jauh sebelum kelahiran, bahkan sejak pasangan merencanakan kehamilan. Salah satu langkah yang dinilai penting adalah mengurangi paparan zat kimia pengganggu hormon (endocrine disrupting chemicals atau EDC), termasuk Bisphenol A (BPA) yang banyak ditemukan pada sejumlah kemasan makanan dan minuman berbahan plastik.

Peringatan tersebut disampaikan pakar obstetri dan ginekologi, Budi Wiweko, dalam podcast bertajuk Akibat Puber Terlalu Cepat bersama Raditya Dika. Menurut dia, kesehatan reproduksi anak dipengaruhi berbagai faktor yang sudah bekerja sejak masa sebelum kehamilan.

"Perencanaan kehamilan itu harus direncanakan. Gak zamannya lagi hamil itu kebetulan, harus direncanakan," kata Budi yang akrab disapa Prof Iko.

Ia menjelaskan, perhatian terhadap paparan zat pengganggu hormon perlu dilakukan sejak masa persiapan kehamilan hingga trimester pertama. BPA menjadi salah satu zat yang mendapat sorotan karena memiliki sifat menyerupai hormon estrogen di dalam tubuh manusia.

Menurut Prof Iko, tiga bulan pertama kehamilan merupakan fase krusial pembentukan organ janin sehingga berbagai risiko lingkungan perlu ditekan semaksimal mungkin.

"Ketika ibu hamil dalam tiga bulan pertama, itu tidak boleh dia terekspos dengan itu," ujarnya. Ia menegaskan bahwa persoalan BPA tidak hanya

terkait kebiasaan konsumsi anak setelah lahir, tetapi juga menyangkut kesiapan calon orang tua dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat sejak tahap perencanaan kehamilan.

Dalam kesempatan itu, Prof Iko juga menyinggung program "Selamatkan Perempuan Indonesia" yang digagas Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia. Program tersebut menempatkan kesehatan perempuan sebagai fondasi utama bagi kesehatan generasi berikutnya.

Menurutnya, pendekatan kesehatan reproduksi tidak cukup dimulai ketika seorang perempuan telah hamil atau saat bayi telah lahir. Persiapan perlu dilakukan bahkan sebelum masa konsepsi.

"Seribu hari pertama kehidupan saya kurang setuju, harusnya mulai seratus hari sebelum hamil itu sudah disiapkan, termasuk BPA, termasuk endocrine disrupting chemical lainnya," katanya.

Prof Iko menjelaskan, sejumlah penelitian internasional menunjukkan bahwa paparan zat pengganggu hormon pada masa awal perkembangan dapat erkaitan dengan berbagai masalah kesehatan reproduksi di kemudian hari. Beberapa di antaranya adalah endometriosis, kista ovarium, sindrom ovarium polikistik (PCOS), hingga sejumlah jenis kanker yang dipengaruhi faktor hormonal.

Meski demikian, ia menekankan bahwa kesehatan reproduksi dipengaruhi banyak faktor. Karena itu, pengurangan paparan BPA perlu

dipandang sebagai bagian dari upaya pencegahan yang lebih luas dan menyeluruh.

Di Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan telah menetapkan batas migrasi BPA maksimum sebesar 0,6 miligram per kilogram atau setara 0,6 bagian per juta (ppm) pada kemasan pangan. Ketentuan tersebut diterapkan untuk menjaga keamanan produk yang beredar di masyarakat.

Pandangan serupa disampaikan psikolog Ratih Zulhaqqi. Menurutnya, pencegahan pubertas dini tidak bisa dilepaskan dari kesiapan orang tua dalam memahami tumbuh kembang anak.

"Pubertas dini ini kan sebenarnya bukan permasalahan pada saat mereka pubertas aja, justru dari sebelum-sebelumnya kan, ketika mereka mau jadi orang tua," ujarnya.

Ratih menilai perhatian terhadap kesehatan anak harus dimulai dari aspek-aspek dasar seperti pola makan, kualitas tidur, aktivitas fisik, hingga jenis makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap hari. Ia mengingatkan bahwa banyak orang tua masih terlalu berfokus pada pendidikan formal, padahal kesehatan biologis anak juga dipengaruhi oleh lingkungan dan pola hidup yang diterapkan sejak dini.

Karena itu, para pakar mendorong keluarga untuk lebih sadar terhadap berbagai faktor lingkungan yang dapat memengaruhi kesehatan hormon dan reproduksi. Langkah sederhana yang dapat dilakukan antara lain memperhatikan jenis kemasan makanan dan minuman yang

digunakan, membaca informasi pada label produk, serta memilih produk yang mencantumkan keterangan bebas BPA jika tersedia.

Upaya tersebut, menurut para ahli, bukan untuk menimbulkan kekhawatiran berlebihan, melainkan sebagai langkah preventif guna menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi tumbuh kembang anak sejak masa perencanaan kehamilan hingga dewasa. (ist/dya)

6 Dampak Buruk BPA bagi Kesehatan

Paparan BPA berlebih yang menumpuk di tubuh dapat memicu

Gangguan Reproduksi: Menurunkan kualitas sperma pria serta memicu PCOS dan menurunkan kualitas sel telur wanita.

Diabetes Tipe 2: Mengganggu kinerja insulin dalam mengontrol gula darah.

Obesitas: Mengacaukan metabolisme dan memicu penumpukan lemak.

Penyakit Jantung: Memicu penyempitan pembuluh darah dan hipertensi.

Gangguan Otak Anak: Mengganggu perkembangan otak janin yang berdampak pada daya ingat dan perilaku anak.

Ilmuwan China Temukan Gen Jagung Berprotein Tinggi, Bisa Gantikan Kedelai



jagung liar dapat mengandung protein hingga 30 persen.

Temuan tersebut memiliki arti penting bagi China yang memproduksi sekitar 300 juta ton jagung setiap tahun. Meski volumenya besar, kadar protein jagung yang relatif rendah membuat kebutuhan industri peternakan dan unggas belum sepenuhnya terpenuhi.

Selama ini kekurangan protein dalam pakan ternak ditutupi melalui impor bungkil kedelai, yaitu residu atau ampas kedelai yang umum digunakan sebagai bahan baku

berhasil disisipkan ke sejumlah varietas jagung hibrida utama di China.

Hasilnya menunjukkan peningkatan kandungan protein biji jagung dari sekitar 8,5 persen menjadi 12 hingga 13 persen. Sementara itu, kandungan protein pada seluruh bagian tanaman meningkat dari sekitar 7 persen menjadi lebih dari 9 persen.

Peningkatan kandungan protein tersebut dicapai tanpa mengorbankan produktivitas tanaman. Faktor ini dianggap sangat penting karena varietas jagung berprotein tinggi akan sulit diterapkan secara luas apabila menyebabkan penurunan hasil panen yang signifikan.

Tim peneliti memperkirakan bahwa kenaikan kandungan protein jagung sebesar empat poin persentase secara nasional dapat menghasilkan tambahan protein yang setara dengan 30 juta ton kedelai impor. Jumlah tersebut setara sekitar 30 persen dari total impor kedelai China dalam setahun.

Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas nutrisi jagung dapat menjadi salah satu strategi penting untuk memperkuat ketahanan pasokan bahan baku industri pakan sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor.

Ke depan, para peneliti akan bekerja sama dengan perusahaan pemuliaan benih untuk mengembangkan varietas jagung berprotein tinggi yang siap dibudidayakan secara luas.

Mereka juga akan terus menelusuri gen-gen baru dengan target meningkatkan kandungan protein biji jagung hibrida hingga mencapai 15 persen. (Ist/dya)



Tim ilmuwan China menemukan gen baru pada jagung liar yang berpotensi meningkatkan kandungan protein jagung modern secara signifikan. Temuan tersebut dinilai strategis karena dapat membantu mengurangi ketergantungan China terhadap impor kedelai yang selama ini menjadi sumber utama protein untuk pakan ternak.

Berdasarkan laporan Yicai Global, tim peneliti yang dipimpin oleh Wu Yongrui dan Wang Haihai dari Chinese Academy of Sciences menemukan gen bernama THP3-T pada Teosinte, spesies jagung liar yang merupakan nenek moyang jagung modern.

Hasil penelitian tersebut dipublikasikan dalam jurnal ilmiah Nature pada 3 Juni 2026. Gen THP3-T diketahui menghasilkan enzim yang

berperan penting dalam proses pembentukan asam amino, yakni komponen dasar penyusun protein.

Peneliti menjelaskan bahwa gen-gen yang berkontribusi terhadap tingginya kandungan protein banyak hilang selama ribuan tahun proses domestikasi tanaman. Selama ini, program pemuliaan jagung lebih berfokus pada peningkatan produktivitas dan hasil panen sehingga kandungan protein tidak menjadi prioritas utama.

Akibatnya, jagung modern saat ini rata-rata hanya memiliki kandungan protein sekitar 8 persen. Sebaliknya,

pakan.

Penelitian terbaru ini melanjutkan temuan tim Wu pada 2022 yang sebelumnya berhasil mengidentifikasi gen berprotein tinggi lain bernama THP9-T. Menurut para peneliti, gen THP3-T dapat bekerja bersama THP9-T untuk meningkatkan kadar protein jagung secara lebih optimal.

Setelah melalui beberapa tahun uji lapangan, kedua gen tersebut



Tren Fruit Peel Manicure, Seni Kuku Hiperrealistis ala Korsel

Industri kecantikan Korea Selatan kembali menggebrak panggung mode internasional. Setelah sukses mempopulerkan tren glass skin dan berbagai teknik riasan wajah yang inovatif, kini giliran dunia nail art yang diramaikan oleh sebuah fenomena unik bertajuk Fruit Peel Manicure.

Tren menghias kuku ini mendadak viral di berbagai platform digital karena menawarkan estetika visual yang tidak biasa yaitu mengubah permukaan kuku menjadi sangat mirip dengan kulit buah-buahan segar yang dilapisi efek kilau (glossy).

Berbeda dari desain kuku bertema buah konvensional yang cenderung mengandalkan gambar dua dimensi atau karakter kartun yang lucu, Fruit Peel Manicure membawa konsep ini ke level yang jauh lebih tinggi.

Tren ini mengusung pendekatan hiperrealistis, di mana fokus utamanya adalah meniru tekstur, gradasi warna, corak, hingga detail terkecil dari lapisan luar buah-buahan seperti anggur, jeruk, ataupun stroberi. Penampilan kuku ini secara instan mampu menciptakan impresi yang manis, ceria, sekaligus playful, menjadikannya sebuah fashion statement yang dinamis bagi para pencinta kecantikan.

Korea Selatan memang telah lama mengukuhkan posisinya sebagai kiblat atau trendsetter kecantikan global. Menurut laporan tren dari Beautynesia, salah satu alasan utama mengapa konsep Fruit Peel Manicure ini begitu cepat meledak dan digemari di sana adalah karena pergeseran fungsi kuku itu sendiri.

Bagi sebagian besar masyarakat urban di Korea Selatan, kuku kini dipandang sebagai sebuah kanvas mini (mini canvas) untuk mengekspresikan kreativitas dan kepribadian diri, dengan tingkat urgensi yang setara dengan penggunaan kosmetik wajah.

Inspirasi tren ini juga lahir dari kekayaan alam lokal, di mana Korea Selatan sangat terkenal dengan kualitas buah-buahnya yang segar

dan premium. Para seniman kuku (nail artist) di Seoul menangkap esensi kesegaran tersebut dan mentransformasikannya ke dalam seni menghias kuku yang estetik.

Karakter anak muda Korea yang sangat menyukai elemen visual yang rapi, detail, dan fotogenik di media sosial turut andil dalam mendorong tren ini hingga melintasi batas negara dan diadopsi oleh para pencinta mode di mancanegara.

Proses Rumit

Mendapatkan hasil akhir Fruit Peel Manicure yang tampak nyata dan juicy memerlukan keahlian khusus dan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Proses pengerjaannya mengadopsi teknik desain tiga dimensi (3D) yang cukup kompleks. Secara umum, tahapan untuk menciptakan seni kuku hiperrealistis ini meliputi beberapa proses krusial.

Pertama, penentuan konsep dan warna dasar. Langkah awal dimulai dengan menentukan jenis buah yang ingin direplikasi, seperti kilau gelap buah anggur atau tekstur pori pada buah jeruk. Kuku kemudian dilapisi dengan warna dasar (base coat) yang sesuai.

Kemudian, teknik gradasi dan layering. Kunci utama agar tampilan kuku terlihat natural terletak pada pengaplikasian teknik gradasi warna (ombre) serta penumpukan lapisan warna (layering). Proses ini membutuhkan sapuan yang halus agar transisi warna kulit buah terlihat menyatu.

Pemberian detail mikro menjadi langkah selanjutnya. Menggunakan kuas ekstra tipis atau alat pembuat titik (dotting tool), penata kuku akan menggambar detail-detail kecil yang spesifik. Hal ini mencakup serat-serat halus, guratan alami, hingga bintik pori yang menyerupai kulit buah aslinya.

Sentuhan akhirnya memakai glossy top coat. Sebagai penutup, kuku dilapisi dengan top coat bening bersorot tinggi (high-shine). Lapisan



ini memberikan efek basah yang membuat kuku terlihat segar seolah-olah baru saja dikupas.

Mengingat kerumitan dan waktu pengerjaan yang tidak sebentar, opsi ini biasanya membutuhkan penanganan dari penata kuku profesional di salon kecantikan.

Namun, bagi mereka yang menginginkan alternatif yang lebih praktis dan ramah waktu di rumah, penggunaan stiker kuku khusus (nail sticker) atau teknik cetak kuku (stamping nail art) dengan motif kulit buah dapat menjadi solusi instan yang tidak kalah menarik. Fenomena Fruit Peel Manicure ini tidak luput dari perhatian media mode internasional utama.

Majalah kecantikan terkemuka seperti Allure dan Vogue Asia mencatat

bahwa tren seni kuku dari Korea Selatan dalam beberapa tahun terakhir memang konsisten bergerak ke arah manipulasi tekstur dan efek visual 3D yang berani.

Para analis mode dari Allure menyebutkan bahwa melonjaknya popularitas Fruit Peel Manicure sejalan dengan tren makro global yang kini menggandrungi segala sesuatu yang berbau organik dan terinspirasi dari alam, namun tetap dikemas secara modern.

Daya tarik utama dari tren ini terletak pada pengaplikasian efek visual menyerupai tetesan air (water-droplet effect) dan tekstur bergelombang di atas kuku, yang dinilai mampu memberikan kepuasan sensorik tersendiri serta pengalaman interaktif bagi penggunaannya. (ist/dya)



Usai Chatib-Budi ...dari hal 1

Kasak-kusuk di Lapangan Banteng akhir pekan ini mendadak kencang, mirip dinamika bursa saham yang naik-turun tak keruan. Di tengah goyahnya nilai tukar rupiah yang bertengger di level Rp18.050 per dolar AS dan keputusan Bank Indonesia (BI) mengerek suku bunga acuan (BI Rate) menjadi 5,50 persen, pintu Istana Negara mendadak terbuka untuk dua figur yaitu Muhammad Chatib Basri dan Budi Gunadi Sadikin.

Selasa (9/6), kedua tokoh finansial itu mendadak menghadap Presiden Prabowo Subianto. Langkah senyap ini seketika menguatkan kembali rumor panas jika posisi Menteri Keuangan yang kini diduduki Purbaya Yudhi Sadewa sedang digoyang isu rotasi. Purbaya santer dikabarkan bakal digeser ke Bank Indonesia, setelah target penerimaan pajak versus realisasi APBN dinilai tak sesuai di tengah tekanan fiskal.

Pihak Istana, melalui Wakil Ketua Umum Gerindra Ahmad Sufmi Dasco, menepis secara diplomatis. Dasco berdalih keduanya dipanggil semata-mata untuk diminta pendapat mengenai situasi makroekonomi, khususnya kejatuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ke level 5.747 dan melemahnya rupiah. Namun di mata pasar, pembicaraan di ruang oval itu tak ubahnya fit and proper test dadakan untuk posisi penjaga pundi negara.

Usai keluar dari pintu gerbang Istana, kedua tokoh tersebut kompak melempar bantahan irit. Budi Gunadi Sadikin, mantan bankir yang kini mengomandoi sektor kesehatan, memilih berseloroh saat dikonfirmasi mengenai potensi dirinya pindah pos.

"Sekarang masih jadi Menkes," kata Budi singkat.

Saat dicecar mengenai latar belakang keuangannya yang dinilai mumpuni untuk membereskan ketimpangan anggaran, ia hanya menjawab, "Kayaknya sudah agak lupa deh."

Bantahan serupa meluncur dari mulut Chatib Basri, yang sore itu keluar bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Mantan Menkeu era SBY ini menegaskan tidak ada tawaran formal dari Prabowo. "Enggak ada. Masa... ini kita bahas soal ekonomi kok," ketusnya.

Meski menampik ada pinangan politik, beberapa jam sebelum ke Istana--tepatnya dalam forum Grab Business Forum 2026--Chatib justru sempat membedah kerangka ekonomi makro Indonesia dengan nada lugas. Ia secara terbuka menyebut bahwa akar melemahnya rupiah saat ini bukan akibat eskalasi perang di Timur Tengah, melainkan murni karena risiko fiskal yang melebar akibat rendahnya penerimaan tunai (cash revenue).

Di hadapan pelaku usaha, Chatib bahkan melontarkan premis yang menarik perhatian: tugas seorang Menteri Keuangan sebenarnya sangat sederhana dalam memperkuat fundamental rupiah dan menekan defisit anggaran.

"Apa yang bisa dilakukan di dalam fiskal? Raise revenue, pasti. Karena tugas dari Menteri Keuangan itu sebetulnya sangat gampang. Dia hanya punya opsi tiga hal: naikkan, potong, pinjem. Enggak ada opsi lain. Kalau Anda enggak bisa naikkan, maka Anda harus potong. Kalau Anda enggak bisa potong, Anda harus pinjem. As simple as that," ungkap Chatib.

Namun, dengan beban pembayaran bunga utang (interest payment) Indonesia yang saat ini menyedot sekitar 22 persen dari total pendapatan, serta rasio layanan utang (debt service) terhadap total penerimaan yang menyentuh angka 52 persen, Chatib menilai opsi menaikkan utang di tengah mahal biaya dana (cost of fund) adalah hal yang mustahil. Menurunkan target pengeluaran secara selektif menjadi satu-satunya jalan rasional yang tersisa.

"Maka, opsi yang paling mungkin itu adalah opsi tiga. Cut the spending

selectively. Jadi, solusinya hanya bahwa fiskalnya itu kemudian harus di-rationalize," tambah Chatib.

Masalahnya, merasionalisasi belanja di tengah besarnya beban anggaran untuk janji politik seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), ketimpangan fiskal, dan bansos sering kali berbenturan dengan kalkulasi politik.

Chatib pun mengutip adagium terkenal dari mantan Presiden Komisi Eropa, Jean-Claude Juncker: "We all know what to do, we just don't know how to get re-elected after we've done it."

Menurut analisis Direktur Eksekutif Center for Economic and Democracy Studies (CEDeS) Zaenul Ula, pemanggilan kedua tokoh ini mengonfirmasi bahwa posisi Purbaya memang berada di ujung tanduk. Prabowo kini dihadapkan pada dua pilihan strategis yang kontras. Memilih Chatib Basri untuk memberi sinyal stabilitas agar investor asing tenang, atau memajukan Budi Gunadi Sadikin jika membutuhkan sosok "menteri tukang beres-beres" yang jago melakukan efisiensi radikal pada pos anggaran yang bocor.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengisyaratkan efisiensi anggaran masih berlanjut di 2027.

Rupiah Rontok: Harga Obat Naik, Tempe Tergerus Kurs

MESKI rupiah ditutup menguat ke level Rp18.050 per dolar AS pada perdagangan Selasa (9/6), pelemahan tajam yang dalam beberapa pekan terakhir sempat menyeret mata uang Garuda ke rekor terendah Rp18.190 per dolar AS mulai menimbulkan dampak nyata di sektor riil. Efeknya terasa dari biaya pengobatan hingga harga bahan pangan berbasis impor

Di sektor kesehatan, masyarakat yang menderita penyakit kronis terpaksa menghadapi lonjakan harga obat-obatan rutin yang mencapai 20 persen. Kondisi ini terjadi karena industri farmasi nasional masih bergantung pada impor untuk memenuhi 85-90 persen kebutuhan bahan baku obat (BBO), yang transaksinya menggunakan dolar AS.

Tanti, seorang pekerja lepas asal Yogyakarta, mengaku terpukul saat menebus resep obat jantung dan asma untuk ibunya yang berusia 81 tahun pada awal Juni ini. Tagihan bulanan yang biasanya sekitar Rp4 juta mendadak melonjak menjadi Rp5,1 juta.

"Obatnya naik sampai 20 persen. Tidak ada pilihan lain karena obat rutin ini tidak boleh terlewat. Bisa berakibat fatal buat Ibu," ujar Tanti.

Kecemasan serupa dirasakan Rosi, penderita diabetes tipe 2 di Bandung yang bergantung pada terapi insulin impor asal Denmark, Ryzodeg FlexTouch. Satu boks berisi lima pena insulin yang biasanya ditebus dengan harga maksimal Rp750.000 kini di sejumlah apotek dan marketplace telah merangkak naik ke kisaran Rp950.000 hingga Rp1 juta.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, mengakui industri farmasi terpaksa melakukan penyesuaian harga agar dapat bertahan menghadapi guncangan kurs. Namun, penyesuaian tersebut dikhawatirkan memicu persoalan baru pada sistem jaring pengaman sosial.

Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi, menilai kenaikan harga obat berpotensi meningkatkan pengeluaran mandiri masyarakat

Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan (Menkeu) menargetkan penggunaan anggaran ke depan akan semakin produktif dan tepat sasaran.

"Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kualitas belanja negara melalui upaya efisiensi dan refocusing agar alokasi anggaran semakin produktif, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah terus mendorong efektivitas subsidi, dan perlindungan sosial dalam melindungi daya beli dan

RAPUHNYA RUPIAH, TERGERUS 30% DALAM 10 TAHUN

Depresiasi

Rupiah 2016-2026

- Mei 2016: Rp13.645 per dolar AS
 - Mei 2026: sekitar Rp17.800 per dolar AS
- Rupiah melemah sekitar 30,45% dalam satu dekade

Faktor Tekanan Global

2018

- Perang dagang AS-China
- The Fed menaikkan suku bunga hingga 2,5%
- Rupiah melemah dari Rp13.788 menjadi Rp14.390 per dolar AS

2020

- Pandemi Covid-19 mengguncang ekonomi global

2022-2024

- Konflik geopolitik
- Era suku bunga tinggi global
- Pemilu serentak di banyak negara
- Rupiah mencapai Rp16.102 per dolar AS pada 2024



(out of pocket) yang saat ini telah mencapai Rp180 triliun per tahun. Situasi tersebut juga dinilai dapat mengancam ketahanan finansial BPJS Kesehatan yang arus kasnya semakin tertekan, dengan sisa dana yang dikabarkan hanya mampu menutup pembayaran klaim kurang dari 1,5 bulan.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, mengingatkan adanya ancaman penurunan kualitas layanan rumah sakit. Pasalnya, lonjakan harga obat tidak diikuti penyesuaian cepat terhadap tarif kapitasi maupun paket klaim INA-CBG's.

"Rumah sakit terjepit, operasional jalan terus. Ujung-ujungnya pasien JKN yang akan menghadapi keterbatasan pelayanan," tegas Timboel. (widrls/dya)



DPRD APRESIASI PEMPROV JATIM RAIH WTP KE-11 BERTURUT-TURUT

Ingatkan Tindak Lanjut Temuan BPK dan Ketimpangan Pembangunan

SURABAYA- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Raihan ini menjadi yang ke-11 kalinya secara berturut-turut.

Capaian itu mendapat apresiasi dari kalangan DPRD Jawa Timur. Namun di balik keberhasilan mempertahankan opini tertinggi dalam audit laporan keuangan tersebut, DPRD mengingatkan masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan. Mulai dari tindak lanjut rekomendasi BPK, maupun persoalan pembangunan yang masih dihadapi masyarakat.

Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak Rouf menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan itu usai Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025, Selasa (9/6/2026). Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

"Kami bersyukur karena Jawa Timur mampu meraih ini dan kami merespon baik, semoga ini dapat dipertahankan sebagai wujud akuntabilitas Jawa Timur dalam meraih anggaran," ujar Musyafak.

Menurut Musyafak, opini WTP yang diraih secara konsisten selama sebelas tahun terakhir menjadi modal penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Namun demikian, ia menegaskan pekerjaan tidak berhenti pada capaian opini semata.

Pasalnya, dalam laporan pemeriksaan yang disampaikan BPK RI masih terdapat sejumlah rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama seluruh perangkat daerah terkait.

"Rekomendasi dari BPK selanjutnya kita selesaikan bersama sesuai arahan BPK RI," tegasnya.

Senada dengan Musyafak, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono menegaskan raihan opini WTP tidak boleh membuat pemerintah daerah terlena. Menurutnya, rekomendasi dan temuan BPK justru harus menjadi perhatian utama dalam upaya



Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa (kiri), Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf (tengah), dan Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara B BPK RI, Widhi Widayat (kanan)

memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan.

"DPRD akan memastikan setiap temuan menjadi bahan evaluasi agar tata kelola keuangan daerah semakin baik dan akuntabel," kata Deni.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Tahun 2025, masih ditemukan sejumlah kelemahan pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Temuan tersebut di antaranya terkait keterlambatan pelaksanaan sejumlah proyek yang belum dikenakan denda, pengelolaan bantuan keuangan desa yang belum memadai, serta tata kelola jaminan pertambangan yang masih memiliki potensi risiko penyalahgunaan.

Menurut Deni, berbagai catatan tersebut harus segera dibenahi agar tidak kembali muncul dalam pemeriksaan tahun berikutnya.

"Kami melihat rekomendasi BPK ini sangat jelas. Ada persoalan yang harus segera dibenahi mulai dari pengelolaan proyek, bantuan keuangan desa, sampai tata kelola sektor pertambangan. Ini harus menjadi prioritas tindak lanjut agar tidak berulang pada tahun berikutnya," ujarnya.

Sekretaris PDI Perjuangan Jawa Timur itu juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai tenggat waktu yang ditetapkan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pemerintah daerah wajib memberikan jawaban dan tindak lanjut atas rekomendasi BPK paling lambat 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

DPRD Jawa Timur, lanjut Deni,

akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan seluruh rekomendasi tersebut benar-benar ditindaklanjuti.

Lebih jauh, Deni menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya diukur dari keberhasilan memperoleh opini WTP. Yang lebih penting adalah memastikan setiap rupiah anggaran daerah mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Semangatnya bukan hanya mempertahankan WTP, tetapi memastikan anggaran yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Jawa Timur. Rekomendasi BPK harus menjadi peta jalan perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan," tegasnya.

DPRD juga mendorong sinergi yang lebih kuat antara legislatif, pemerintah daerah, dan BPK dalam mengawal pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

"Kami ingin seluruh rekomendasi dituntaskan dengan baik. Ketika tata kelola keuangan semakin kuat, maka kepercayaan publik meningkat dan manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Jawa Timur," imbuhnya.

Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Puguh Wiji Pamungkas Ia mengingatkan bahwa opini WTP pada dasarnya menilai kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Karena itu, keberhasilan tersebut perlu diikuti dengan pembangunan yang mampu menjawab berbagai persoalan sosial yang masih dihadapi masyarakat Jawa Timur.

"Meski hal ini menunjukkan tata

kelola keuangan yang akuntabel dan transparan, catatan kritis tetap diperlukan agar capaian administratif ini benar-benar berkontribusi pada pembangunan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di Jawa Timur," ujarnya.

Menurut Puguh, sejumlah indikator pembangunan menunjukkan masih adanya tantangan yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah. Di sektor ekonomi misalnya, persentase penduduk miskin di Jawa Timur masih berada pada kisaran 9,3 persen meskipun angka kemiskinan ekstrem telah berhasil ditekan hingga 0,29 persen.

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka masih berada pada angka 4,2 persen. Walaupun lebih rendah dibanding rata-rata nasional yang mencapai 5,3 persen, persoalan pengangguran masih menjadi perhatian terutama di kawasan perkotaan.

Di bidang pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur tahun 2025 tercatat naik menjadi 74,65 dari sebelumnya 74,00. Namun angka tersebut masih berada di bawah DKI Jakarta yang telah mencapai 81,65.

Puguh juga menyoroti masih lebarnya kesenjangan pembangunan antardaerah di Jawa Timur. Hal itu terlihat dari perbedaan capaian IPM yang cukup signifikan antara Kota Surabaya yang telah mencapai angka 82,0 dan Kabupaten Sampang yang masih berada pada angka 66,5.

"Masih ada ketimpangan akses air bersih, sanitasi, dan perumahan layak di wilayah pedesaan. Di sektor kesehatan, kasus TB masih menyentuh angka sekitar 50 ribu kasus per tahun, ditambah distribusi tenaga kesehatan yang belum merata. Begitu pula infrastruktur, proyek tol dan pelabuhan memang pesat, tetapi konektivitas di desa-desa terpencil masih sangat terbatas," urainya.

Karena itu, Puguh mendorong agar keberhasilan mempertahankan opini WTP dibarengi dengan langkah-langkah nyata untuk meningkatkan kualitas pembangunan. Menurutnya, audit tidak hanya harus berfokus pada aspek administratif, tetapi juga perlu melihat dampak sosial dan ekonomi dari penggunaan anggaran daerah. (pra,adv/dya)